

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OKI**

Riri Hanifa

Universitas Sumatera Selatan
Email: ririhanifa@uss.ac.id

Vera Amalia

Universitas Adiwangsa Jambi
Email: vera.amelia#unaja.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menguji hasil dari kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI, dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah perhitungan rasio berdasarkan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI, data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dokumen yang terdiri dari laporan keuangan, struktur organisasi, sejarah BPKAD serta visi dan misi BPKAD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan perhitungan yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masuk dalam katagori rendah sekali dan dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan masih berada diatas standar keuangan.

Kata Kunci: kinerja keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi wewenang untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan. usaha pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tersebut dalam

penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Anggaran memiliki peran untuk mensejahterakan rakyat serta dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi penting dilingkungan daerah. Hal ini terkait dengan dampak APBD terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja anggaran adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dari setiap kegiatan yang terstruktur. Kinerja anggaran pemerintah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebagai unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia, Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode rasio keuangan (*financial ratio*), metode *Economic Value Added/EVA* (Diindonesia metode tersebut dikenal dengan metode *NITAMI* atau Nilai tambahan ekonomi). Dan analisis anggaran (Ekawarna, Sam, Rahayu, 2009).

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang telah dibuat. Tidak hanya sebagian bahan evaluasi saja, tapi karena tidak semua pengguna laporan keuangan

memahami akuntansi dengan baik, maka analisis laporan keuangan juga digunakan untuk membantu memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain analisis laporan keuangan di sini dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara membaca laporan keuangan. Salah satu cara untuk mengevaluasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada pos-pos yang terdapat dalam laporan

keuangan. (Syamsudin,2007:39).

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo,2004:182).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. (Halim, 2012: 230). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah salah satu dari organisasi perangkat daerah yang ada dalam lingkungan Pemerintah yang berkedudukan sebagai Badan Daerah. BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu instansi pemerintah yang juga mengelola APBD untuk kepentingan pegawai maupun masyarakat sekitar. Hal ini terkait dengan dampak APBD terhadap kinerja pemerintah sehubungan dengan fungsi memberikan pelayanan terhadap masyarakat. BPKAD perlu melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan keuangan dan financial yang pada setiap tahun mengalami penurunan dan kenaikan kinerja keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan APBD di kabupaten Ogan Komering Ilir yang harus dilakukan adalah membandingkan laporan keuangan pada periode 2018, 2019, 2020. Untuk membandingkan kinerja keuangan penulis hanya menggunakan analisis rasio kemandirian dan rasio efisiensi, dalam hal ini rasio kemandirian dan rasio efisiensi digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan APBD pada BPKAD.

Tabel 1
Perhitungan Rasio Kemandirian
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Tahun	Rasio Kemandirian	Pola hubungan
1	2018	22%	Instruktif
2	2019	11%	Instruktif
3	2020	18%	Instruktif

Sumber : Rasio Kemandirian, 2021.

Tabel 2
Pola Perhubungan dan Tingkat Kemandirian
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011.

Berdasarkan dapat dilihat tabel tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2018 Rasio Kemandirian dengan besarnya persentase 22% dikategorikan kemampuannya rendah sekali, pada tahun 2019 Rasio Kemandirian Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan diakibatkan dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah memiliki persentase sebesar 11% yang dikategorikan kemampuannya rendah sekali, pada tahun 2020 Rasio Kemandirian Daerah mengalami peningkatan pada dana Pendapatan Asli Daerah naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 18% dikategorikan rendah sekali.

Tabel 3
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Tahun	Persentase	Kriteria
1	2018	100%	Efisien berimbang
2	2019	101%	Tidak efisien
3	2020	110%	Tidak efisien

Sumber : Rasio Efisiensi, 2021.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil tingkat Efisiensi Keuangan Daerah pada Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2018 menunjukkan persentase sebesar 100% dikategorikan kemampuannya Efisiensi berimbang, pada tahun 2019 Efisiensi Keuangan Daerah mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 101% yang dikategorikan kemampuannya tidak efisien, pada tahun 2020 Efisiensi Keuangan Daerah mengalami peningkatan pada dana Realisasi Belanja Daerah naik dari tahun sebelumnya sebesar 110% dikategorikan tidak efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti akan mengambil judul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahan: “Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan rasio kemandirian dan rasio efisiensi ?”

KAJIAN PUSTAKA

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat + pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam

mengfesiensikan biaya yang dikerluarkan oleh pemerintah. Menurut (Mardiasmo, 2013:112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kuantitatif. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. (Moh. Nazir, 2005:84)

Menurut Sugiyono (2014:23) menyatakan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:23). Metode penelitian kuantitatif mempunyai tujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Teori merupakan kerangka dalam penelitian kuantitatif yang melandasiperumusan masalah atau pertanyaan, pengembangan hipotesis, pengujian data, dan pembuatan kesimpulan. Posisi dan peran teori dalam penelitian kuantitatif direfleksikan dalam hasil penelitian yang berupa dukungan atau penolakan terhadap teori (Sugiyono, 2015:7). Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang beralamat Jalan Letjend Yusuf Singadekane Baru No 45 Kayuagung Kabupaten Komering Ilir.

Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menurut Azuar Juliandi dkk (2014, hal. 69) menyatakan “Wawancara (interview) adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian”. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha Juan Prabu Futniture, Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Sesungguhnya yang dimaksud observasi ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dalam arti bahwa data tersebut di himpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indera, Studi Pustaka Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, membaca dan mempelajari serta memahami literature referensi yang bersumber dari buku, jurnal, makalah dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan kejelasan konsep dan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan didalam bab-bab sebelumnya, Analisis kinerja keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar akurat. Dalam analisis kinerja keuangan ini yang sebagaimana telah diuraikan pada indikator dalam variabel dan yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu Rasio kemandirian Keuangan daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan

sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat + Pinjaman}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 356.429.244.700}}{\text{Rp.1.582.372.242.000} + \text{Rp.2.960.582.000}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 356.429.244.700}}{\text{Rp. 1.585.332.824.000}} \times 100\%$$

$$= 22\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 190,197,170,951}}{\text{Rp. 1,692,274,744,000} + \text{Rp.2.960.582.000}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 190,197,170,951}}{\text{Rp. 1,695,235,326,000}} \times 100\%$$

$$= 11\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 290,303,807,756}}{\text{Rp.1,579,274,107,000} + \text{Rp.2.960.582.000}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 290,303,807,756}}{\text{Rp. 1,582,234,689,000}} \times 100\%$$

$$= 18\%$$

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 2,241,789,545,496}}{\text{Rp. 2,231,866,781,700}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 2,419,908,565,504}}{\text{Rp. 2,403,175,344,618}} \times 100\%$$

$$= 101\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 2,641,937,247,333}}{\text{Rp. 2,391,447,245,668}} \times 100\%$$

$$= 110\%$$

PEMBAHASAN

Tabel 4

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat +Pinjaman	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan
2018	Rp. 56.429.244.700	Rp. 1.585.332.824.000	22%	Rendah Sekali
2019	Rp.190,197,170,951	Rp. 1,695,235,326,000	11%	Rendah Sekali
2020	Rp.290,303,807,756	Rp. 1,582,234,689,000	18%	Rendah Sekali

Sumber : Data Diolah, 2021.

Pada tabel diatas, dapat dilihat dan diketahui bahwa perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam tiga (3) tahun terakhir 2018-2020. Pada periode tahun 2018 rasio kemandirian yang dihasilkan yaitu sebesar 22%. Pada periode tahun 2019 rasio kemandirian mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar

11% sehingga menjadi 11%. Pada periode tahun 2020 rasio kemandirian mengalami kenaikan yaitu sebesar 7% sehingga menjadi yaitu 18%.

Adapun hasil penilaian kinerja keuangan dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk tahun 2018-2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina,2011.

Berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selama ini menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah sekali atau termasuk kedalam pola Instruktif yang berarti Peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu melaksanakan Otonomi Daerah). Terlihat dari hasil perhitungan yang ada dari tahun 2018 sebesar 22%, tahun sebesar 2019 yaitu 11%, dan 2020 sebesar 18% sangat jauh dari standarisasi keuangan yang ada. Yang berarti pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir masih sangat bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Maka dapat disimpulkan besarnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria
2018	Rp. 356.429.244.700	Rp. 1.585.332.824.000	100%	Efisien Berimbang
2019	Rp. 190,197,170,951	Rp. 1,695,235,326,000	101%	Tidak Efisien
2020	Rp. 290,303,807,756	Rp. 1,582,234,689,000	110%	Tidak Efisien

Sumber : Data Diolah, 2021.

Pada tabel 6 diatas, dapat dilihat dan diketahui bahwa perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam tiga (3) tahun terakhir 2018-2020. Pada periode tahun 2018 rasio efisiensi yang dihasilkan yaitu sebesar 100%. Pada periode tahun 2019 rasio efisiensi mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 1% sehingga menjadi 101%. Pada periode tahun 2020 rasio efisiensi mengalami kenaikan yaitu sebesar 9% sehingga menjadi 110%.

Adapun hasil penilaian kinerja keuangan dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah untuk tahun 2018-2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Kriteria Pengukuran Efisien
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien erimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mohammad Mahsun (2011:187)

Berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio efisiensi Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selama ini

menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kriteria keuangan daerah dengan tingkat kemampuan keuangan daerah setiap tahun mengalami peningkatan yang dikategorikan Tidak Efisien. Terlihat dari hasil perhitungan yang ada dari tahun 2018 sebesar 100%, tahun sebesar 2019 101%, dan 2020 sebesar 110% ini menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan belum mampu meminimalisir biaya pemungutan dalam merealisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya.

Dari hasil penelitian ini maka dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu pada skripsi Amelia Okrivina D. Siregar (2020) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Jawa Barat. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah. Sedangkan perbedaan antaran keduanya yaitu terdapat penambahan analisis analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio keseharian. Dari hasil penelitian ini kinerja keuangan tidak baik dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah, sedangkan hasil penelitian dari Amelia Okrivina D.Siregar yaitu kondisi keuangan yang dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah memperlihatkan kondisi yang cukup baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan rangkuman hasil analisis kinerja keuangan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kinerja Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten OKI dengan menggunakan rasio kemandirian daerah masih rendah sekali,hal ini terjadi dikarenakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten OKI bergantung dengan pemerintah pusat. selain itu juga pemerintah daerah Kabupaten OKI tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten OKI masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat.
2. Kinerja Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten OKI dengan menggunakan rasio efisiensi yang berada diatas standar keuangan daerah terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten OKI, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten OKI. Untuk pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten

OKI untuk belanja modal cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten OKI dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten OKI lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
2. Pemerintah Kabupaten OKI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). 2009. *Committee on Terminology*. New York: AICPA Inc.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), *objective of financial statement, FABS, Statement. Dalam Harahou. Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja GrafindoPrakasa.
- Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina. 2011. “*Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005- 2009*”. Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [7] Badrudin. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- D. Siregar Amelia Oktrivina, 2020 *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok Jawa Barat*.

- Djaenuri, Aries (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Indonesia Ghalia.
- Effendi, Rizal. 2013. *Accounting Principles: Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada
- EKAWARNA, Shita Unjaswati; SAM, Iskandar; RAHAYU, Sri.2009, 1.1: 49-66. *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi.
- Harrison Jr Walter T., Horngren, C William Thomas, Suwardy T, 2013, *Akuntansi Keuangan-Edisi IFRS, Edisi Kedelapan, Jilid 2*. Erlangga, Jakarta.
- Harrison Jr, Walter T. et al. 2013. *Akuntansi keuangan : international financial reporting standard*. Jakarta : Erlangga.
- Juminga 2006: 239. *Analisis laporan keuangan*. PT. Bumi aksara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mahsun, Moh., Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE: Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi
- Melatanun Melsiano Yosias, 2019 *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Rahmayati Anim, 2016 *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*.
- Sadeli, Prof. Drs. H. Lili. M, M.Pd. 2016. *Dasar-dasar Akuntansi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sadjiarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja pemerintahan*, Jurnal Akuntansi & Keuangan, yor.2, No. 2, Nopember 2000: 13g - 150.
- Saputra Sandy Candra, 2018 *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembran tahun 2010 Sampai Dengan 2014*.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Surastowo, 2019 *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur*.

Syamsuddin, Lukman. 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Rajawali Persada.

Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang keuangan negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang anggaran pendapatan belanja negara.

Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pres.